

EDISI KEDUA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diana Halim Koentjoro & Johannes Sardadi

		PERPUSTAKAAN	
No. INV.	040/mhk/19/c-1		
th. Angg.	2019	Cat	C-1
PARA	<i>gm</i>	TGL	16/07/2019



Penerbit Universitas Atma Jaya - Jakarta

2012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	7
Pendahuluan	9
Bab 1 Hakikat Hukum Administrasi Negara	12
1.1. Arti dan Tujuan Hukum Administrasi Negara	12
1.2. Istilah Administrasi Negara	17
Bab 2 Perbedaan HAN dan Ilmu Hukum Lain	19
2.1. Ciri-Ciri Hukum Administrasi Negara (HAN)	19
2.2. Perbedaan HAN dan Ilmu Hukum Lain	26
2.2.1. Hubungan HAN dan Hukum Tata Negara	27
2.2.2. Hubungan HAN dan Hukum Perdata	28
2.2.3. Hubungan HAN dan Hukum Pidana	29
Bab 3 Administrasi Negara	31
3.1. Administrasi Negara/Pejabat TUN	31
3.2. Jabatan (<i>ambt</i>) dan Pemangku Jabatan (Pejabat/ <i>Ambts drager</i>)	36
3.3. Urusan Pemerintahan	37
3.4. Doktrin <i>Trias Politica</i>	38
3.5. Pemerintahan Daerah	39
Bab 4 Landasan Hukum Administrasi Negara	44
4.1. Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>)	44
4.1.1. Pengertian	44
4.1.2. Klasifikasi Negara Hukum	46

4.1.2.1. Negara Hukum Klasik	46
4.1.2.2. Negara Hukum Modern	47
4.2. Asas Legalitas	48
4.3. Kebebasan Bertindak Administrasi Negara	50
4.4. Sumber Hukum	57
4.4.1. Sumber Hukum Tertulis	58
4.4.2. Sumber Hukum Tidak Tertulis	59
Bab 5 Fungsi dan Aktivitas Administrasi Negara	66
5.1. Umum	66
5.2. Tindakan Hukum TUN	68
5.3. Kekuatan Hukum Suatu Ketetapan Sah	75
5.4. Macam-Macam Keputusan TUN	77
5.4.1. Ketetapan Deklaratoir dan Ketetapan Konstitutif	78
5.4.2. Ketetapan yang Menguntungkan dan yang Membebaskan	79
5.4.3. Ketetapan <i>Eenmalig</i> dan Ketetapan Permanen	79
5.4.4. Ketetapan yang Terikat dan Ketetapan Bebas	79
Bab 6 Pengawasan	83
6.1. Pengawasan Intern dan Ekstern	84
6.1.1. Pengawasan Intern	84
6.1.2. Pengawasan Ekstern	86
6.2. Pengawasan Preventif dan Represif	87
6.2.1. Pengawasan Preventif	87
6.2.2. Pengawasan Represif	87
6.3. Pengawasan dari Segi Hukum	87
Daftar Pustaka	89
Lampiran UU No. 5/1986 beserta Penjelasan	91